

SUMMARY DISTRICT CITIZEN ENGAGEMENT PLAN

PROPINSI NUSA TENGGARAN BARAT – PULAU LOMBOK

Kabupaten Lombok Barat

Visi Kabupaten

Terwujudnya warga, organisasi masyarakat sipil, termasuk kelompok adat, yang berdaulat. Perempuan, anak, dan kelompok marginal lainnya berdaya dan terlibat secara aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monev). Masyarakat hulu (pusat sumber air/ pinggir hutan) dan masyarakat hilir (pengguna air) dapat berinteraksi untuk hasil yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Anak-anak wajib belajar 12 tahun dapat menikmati pendidikan yang gratis dan bermutu. Media komunitas dapat menjadi saluran untuk kontrol dan pencerahan. Warga masyarakat yang terorganisir saling menghormati, menghargai dalam upaya perlindungan HAM dan pemenuhan HAK EKOSOB DAN SIPOL. Elemen masyarakat, pemda dan legislatif menjalin komunikasi intensif. Masyarakat mengelola potensi lokalnya secara mandiri. Nelayan, petani, dan buruh memiliki kapasitas yang meningkat dan dapat mengakses sarana produksi serta jaringan pasar.

Pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik untuk pemenuhan hak-hak dasar yang ramah, terjangkau dan berkualitas bagi semua. Pemerintah memberikan kepastian ruang partisipasi publik. Pemerintah mampu menjalankan produk kebijakan yang bertujuan untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak EKOSOB DAN SIPOL WARGA. Institusi penegakan hukum (polisi, Pengadilan) dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

DPRD yang tanggap terhadap aspirasi warga dan mampu untuk melahirkan produk kebijakan yang berpihak pada perempuan, ormis, dan kelompok marjinal lainnya tanpa diskriminasi serta memperhatikan dan menjaga kearifan lokal.

Pengusaha dan Pengelola SDA memiliki tanggung jawab lingkungan dan sosial yang kuat untuk menjamin keberlanjutan.

Visi Final :

“Terwujudnya kemandirian warga dan mendorong tata pemerintahan yang lokal demokratis di Lombok Barat.”

Agenda Bersama Kabupaten Lombok Barat

1. Wujudkan organisasi rakyat yang kuat dan mampu melakukan kontrol terhadap pembangunan
2. Pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan (pengelolaan sumber air dan jasa lingkungan)
3. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (penguatan kapasitas masyarakat di HKM, HTR, KPH)
4. Mendorong proses politik penganggaran yang transparan dan akuntabel.
5. Memperjuangkan terpenuhinya hak-hak dasar atas pendidikan dan kesehatan bagi perempuan, orang miskin, anak dan kelompok marjinal lainnya

Summary Concep Paper

Kabupaten : Lombok Barat
Nama Lembaga : Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI)
Judul : Penguatan kapasitas kelembagaan warga dan fasilitator lokal yang kuat dalam mendorong terwujudnya Tata Pemerintahan Lokal Demokratik di kabupaten Lombok Barat
Periode Program : 3 tahun

Rencana aksi yang digambarkan dalam concept paper ingin mewujudkan organisasi warga yang kuat dan mampu melakukan control terhadap hasil-hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) di semua level di kabupaten Lombok Barat. Warga termasuk orang miskin, perempuan, anak dan kelompok marjinal lainnya berpartisipasi dalam seluruh tahapan pembangunan. Strategy yang akan dipergunakan dalam rencana aksi meliputi penguatan kapasitas kelompok warga dan fasilitator, review proses dan hasil musrenbang, analisis anggaran, memperkuat lingkaran belajar dan networking antara organisasi dan lintas actor dan Mengembangkan mekanisme kontrol partisipatif/ kartu penilaian berkaitan dengan pelayanan dasar. Rencana aksi menggunakan pendekatan partisipatif. Program akan bekerja dengan fasilitator desa, fasilitator pendukung, dan organisasi warga. CP ini berusaha untuk berkontribusi pada percepatan TKLD, yakni melalui kelompok warga yang kuat, yang dapat berpartisipasi dalam merencanakan dan mengontrol hasil pembangunan.

Kabupaten : Lombok Barat
Nama Lembaga : KONSEPSI
Judul : Membangun dan memperkuat akses dan kontrol OMS melalui advokasi pengelolaan SDA berbasis masyarakat di kabupaten Lombok Barat
Periode Program : 3 tahun

Tujuan utama rencana aksi KONSEPSI untuk mewujudkan organisasi rakyat yang kuat dan mampu mewujudkan organisasi rakyat yang kuat dan mampu melakukan control terhadap pembangunan. Pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan (pengelolaan sumber daya air dan lingkungan), pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (penguatan kapasitas masyarakat di HKM, HTR dan KPH), mendorong proses politik penganggaran yang transparan dan akuntabel. Pendekatan yang dipergunakan dalam rencana aksi adalah pendekatan partisipatif. Strategy yang akan dipergunakan untuk mewujudkan tujuan rencana aksi adalah penguatan kapasitas, memperkuat jejaring, advokasi dan pendampingan. Program akan bekerja dengan fasilitator desa, fasilitator pendukung, dan organisasi warga. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat yang dapat mengakses dan menggunakan hak kelola SDA (sumber daya alam) melalui pengembangan HKM/ HTR dan jasa lingkungan. Organisasi dan jaringan organisasi rakyat yang kuat dan dapat mengontrol pembangunan. Bentuk-bentuk usaha pemenuhan hak-hak dasar atas pendidikan dan kesehatan bagi perempuan, orang miskin, anak dan kelompok marginal lainnya Kegiatan2, promosi, dan advokasi proses penganggaran yang transparan dan akuntabel. CP ini berusaha untuk berkontribusi pada percepatan TKLD, yakni melalui kelompok warga yang kuat agar dapat mengakses dan menggunakan hak kelola SDA (sumberdaya alam). Relevansi proposal dengan ACCESS Tahap II terletak pada kontribusinya pada tercapainya core statement ACCESS Tahap II.

Kabupaten : **Lombok Barat**
Nama Lembaga : **Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lombok Barat**
Judul *Concept Paper* : **Penguatan Peran Community Centre Dalam Mendorong Pemenuhan Hak-hak Dasar Warga untuk Mendapatkan Pelayanan Publik yang Optimal di Kabupaten Lombok Barat.**
Durasi program : **30 bulan**

Jaringan Masyarakat Sipil Lombok Barat merancang sebuah rencana aksi untuk memperkuat peran dan kapasitas *Community Centre* di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lombok Barat sebagai tempat pengaduan warga, pusat informasi bagi pemberi layanan dan menjadi alat untuk mempengaruhi dan melakukan control terhadap kebijakan public sehingga layanan publik berkualitas, berpihak pada kelompok miskin, perempuan, anak dan kelompok marjinal lainnya. Selain itu rencana aksi ini ingin melakukan internalisasi nilai-nilai tata pemerintahan local demokratik kedalam mekanisme JMS, lembaga anggota JMS serta CC. Strategy yang digunakan dalam pelaksanaan rencana aksi ini adalah penguatan kapasitas, replikasi community centre, advokasi dan pengorganisasian. Konsep paper ini bersinergi dengan aspek-aspek dalam tata pemerintahan lokal demokratis, khususnya partisipasi warga, transparansi dan akuntabilitas, kualitas layanan public dan keadilan sosial. Relevansinya dengan ACCESS Tahap II karena mendorong pemberdayaan community centre, mendorong terjadinya aksi interaksi warga, organisasi warga dan pemerintah dan akan dikembangkan di setiap kecamatan di seluruh Lombok Barat.